



Tanggapan: Penanganan Anak Jalanan

MENANGGAPI tulisan yang dimuat di harian *Kedaulatan Rakyat* hari Jumat, 1 Mei 2009, halaman 2 tentang tulisan "Pemasangan Papan Larangan Beri Uang Anjal, Pemkot Yogya Tidak Bisa Jalan Sendiri", serta pada hari Senin, 11 Mei 2009, halaman 3 tentang "Untuk Segera Dibahas, Dewan Minta Dinsos Serahkan Raperda Anjal", bersama ini sekaligus kami sampaikan:

1. Bahwa Pemkot Yogya melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menjalin hubungan kerja sama dengan Pemkab Sleman yang diperkuat dengan telah disusunnya MoU antar pemerintah daerah dalam penanganan anak jalanan. Dalam pelaksanaannya Pemkot Yogya telah membentuk tim yang melibatkan personel dari Pemerintah Propinsi DIY, dan ke depannya Pemkot Yogya juga akan menjalin kerja sama dengan Rumah-rumah Singgah, Organisasi Sosial dan Lembaga-lembaga Sosial yang peduli terhadap permasalahan anak jalanan.

2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi setuju apabila Perda tentang anak jalanan termasuk gepeng segera dapat direalisasikan, mengingat di Kota Yogyakarta masih banyak terdapat anak jalanan dan gepeng yang berasal dari luar daerah, sehingga keberadaan perda tersebut dapat dipergunakan sebagai landasan dalam penanganan anak jalanan dan gepeng seperti dimaksud.

Demikian tanggapan kami, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. □ - c. (1342-2009).

Herman Edy Sulistiyo SH,
NIP 195603281990031001, Kepala Bagian
Humas dan Informasi Setda
Kota Yogyakarta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005